PERAN APARATUR DALAM PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* ERA DIGITAL DI KANTOR CAMAT TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

ELIS H. YUSUF
NIM. D02416254

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHGORONTALO
GORONTALO
2020

PERAN APARATUR DALAM PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* ERA DIGITAL DI KANTOR CAMAT TIBAWA KABUPATEN GORONTALO

Elis H Yusuf Ahmad [1], Trisusanti Lamangida[2], Sri Lestari H. Gintulangi[3]
[12]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
[3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : elisyusuf383@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Role of Apparatus in the Implementation of Digital Era E-Government in the Tibawa Sub-District Office of Gorontalo Regency. This study uses a descriptive qualitative approach, data collection techniques carried out by observation, interviews, documentation. Data analysis used Milles Huberman and Saudana 2014 formulations; collection date, reduction date, display date, verification. The results of the study concluded that the Role of Apparatus in the Application of Electronic Government Digital Era in the District Office of Tibawa, Gorontalo District has not been effectively seen from the human resources that are still contracts / honoraria and are not yet professional in the service of correspondence on computer power, as well as internet systems which become obstacles in service. It is expected that the government optimizes the implementation of services by conducting education and training on computer operation and increasing supervision / control and must further socialize because there are still many ordinary people who do not understand how to fill.

Keywords: Apparatus, E-government, Society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Aparatur dalam Penerapan E-Goverment Era Digital di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriftif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara, Dokumentasi. Analisis data menggunakan formulasi Milles Huberman dan Saudana 2014; collection date, reduction date, display date, verifikasication. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo belum efektif dilihat dari sumber daya manusia yang masih kontrak/honor dan belum profesional dalam pelayanan surat menyurat pada tenaga komputer, serta sistem internet yang menjadi kendala dalam pelayanan. Maka diharapkan kepada pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang pengoprasian komputer serta meningkatkan pengawasan/ pengontrolan dan harus lebih melakukan sosialisasi kerena masih banyak masyarakat awam yang belum paham cara pengisian.

Kata Kunci: Aparatur*, E-government,* Masyarakat.

PENDAHULUAN

Electronic Government (*e-goverment*) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk reformasi birokrasi dan mendukung dengan sebaik-baiknya sebagaimana di atur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut yaitu mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dewasa ini kemajuan teknologi informasi memasuki fase perkembangan yang sangat pesat, berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk dalam hal birokrasi (pemerintahan).

Agar mengetahui pelaksanaan Program Indonesia pintar yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Inpres tersebut diperkuat dengan peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dan diperbarui menjadi Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dalam bidang pendidikan di Indonesia. Presiden mengeluarkan kebijakan ini dibidang pendidikan dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan dan mengurangi usia putus sekolah yang ada di Indonesia.

Seperti kutipan ayat Alquran: "Jadilah kalian sebaik-baik manusia." (QS. Ali Imran: 110). Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda: "Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga." (HR. Tirmidzi). Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Swt: "Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri." (QS. Al-Isra': 7)**.**

Pemerintah Provinsi Gorontalo mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Melalui Visi provinsi inovatif, Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang melaksanakan proses transformasi menuju *E-government* yang menuntut adanya perubahan-perubahan yang inovatif. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan satuan kerja lingkup Pemerintah Provinsi gorontalo bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan. (Pemprov Gorontalo, 2008)

Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 melalui Dinas Kominfo tengah melakukan evaluasi terhadap optimalnya penerapan SPBE yang telah diterapkan. Hasil verifikasi dan validasi di Tempat pada pelaksanaan evaluasi disebut bakal menjadi data indicator

tingkat kematangan SPBE Kabupaten Gorontalo. Dalam evaluasi yang tengah dilakukan Dinas Kominfo, ia menyebut, beberapa tingkat kematangan pada kapabilitas proses yang dinilai ditingkat organisasi perangkat daerah (OPD) meliputi, perintisan, pengelolaan, standarisasi, integrasi dan pengukuran, serta optimalisasinya. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas dan fungsi teknis dinilai dari informasi layanan, interaksi, transaksi pertukaran informasi dan layanan, kolaborasi, serta optimalisasi layanan SPBE yang beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal mapun ekternal. (Info Kab_Gto, diakses 06 November 2019)

Observasi awal yang dilakukan di Kantor Camat Tibawa, Bahwa"*E-government* memang sudah diterapkan di Kantor Camat Tibawa, namun belum adanya SDM yang ahli dalam mengoprasikan Aplikasi *E-government* dan untuk tenaga komputer yang melayani pengurusan surat menyurat seluruhnya dikerjakan oleh tenaga kontrak/honor sehingga pelaksanaan pelayanan terkesan lambat dan kurang efektif".

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana "Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendiskripsikan bagaimana Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil dengan metode penelitian kualitatif dari masing-masing individual yang ada dalam objek/lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya data sekunder adalah semua data dari dokumen-dokumen yang diperoleh Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data *(Data Reduction*), Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan *e-government* Kecamatan di Kantor Kecamatan Tibawa. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan wawancara dengan

informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran aparatur dalam penerapan *e-government* Kecamatan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan *e-government* Kecamatan di Kantor Kecamatan Tibawa, maka peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang terpilih terkait penerapan *e-government* Kecamatan yaitu, Kepala Kecamatan Tibawa, Sekretaris Kecamatan Tibawa, Kepala Seksi Tibawa dan Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tibawa. Adapun hasil tentang efektivitas penerapan *e-government* Kecamatan di Kantor Kecamatan Tibawa akan diuraikan sebagai berikut :

Gambaran Umum *e-government* di Kantor Camat Tibawa

E-government Kecamatan merupakan system aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di Kecamatan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Drs. Latif Supatman, M.Pd selaku Camat Tibawa di Kantor Kecamatan Tibawa:

> *"e-government Kecamatan merupakan program yang di luncurkan oleh Bapak Bupati sebagai program untuk menuju Kabupaten menjadi lebih baik. Jadi, e-government diluncurkan sebagai alat untuk mengembangkan atau memajukan daerah dalam bidang digital serta agar memermudah masyarakat dalam mengurus sesuatu yang dibutuhkan di kantor camat."*

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa *e-government* adalah aplikasi yang diluncurkan untuk memudahkan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah demi mengoptimalkan pelayanan demi menjadi kabupaten yang berkembang.

Perencanaan Penerapan *e-government* di Kantor Camat Tibawa

UUU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 tentang ASN bahwa sebagai perencana, pelaksana, pengawasan penyelenggara tugas ilmu pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan public yang profesioanal, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

1. Peran aparatur sipil Negara dalam perencenaan Situs Informasi *e-government.*

Sesuai wawancara dengan Abdurahman Abdul, S.AP Kasubag Umum Dan Kepegawaian bahwa :

> *"peran aparatur sipil negara dalam perencanaan situs e-government belum berjalan sesuai dengan tuntunan zaman, hal ini disebabkan beberapa hal, seperti masih ada masyarakat yang belum paham tentang e-government,"*

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi

yang ada, maka perlu disosialisasikan lagi apa tujuan dan manfaat aplikasi *e-government*.

2. Penerapan Situs Informasi *e-government*

Dari wawancara yang dilakukan kepada ibu Marlin Ibrahim, SE Operator Komputer menyarakan bahwa:

> *"penerapan yang dilakukan belum maksimal, ini disebabkan masih ada pengembangan dan penerapan yang bertahap untuk dilakukan, ini menjadi salah satu tugas kecamatan untuk lebih baik lagi dalam menerapkan e-government agar berjalan sesuai yang diharapkan"*

Dari hasil diatas diketahui bahwa penerapan di kecamatan Tibawa belum begitu maksimal dikarenakan beberapa alasan, seperti masih ada pengembangan dalam aplikasi serta penerapanya, namun demikian kecamatan tibawa sudah lebih baik dari yang lain dikarenakan sudah memiliki akses jaringan yang lumayan baik serta ada beberapa pegawai ASN yang memahami IT.

3. Penyiapan SDM

Penerapan *E-government*juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka penerapan *E-government*tidak dapat tercapai dengan baik. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah sikap aparatur dalam penerapan *E-government*, aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan serta skillyang memadai, juga membudayakan berbagi informasi yang mendukung penerapan *E-government* (Indrajit, 2002). Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting. Penerapan *E-government*tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya tidak diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam penerapan *E-government*. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan akan terhambat karena penempatan infrastruktur manusianya tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.

Dari wawancara yang dilakukan kepada ibu Sella Jehan Yusuf selaku manyarakat tibawa menyarakan bahwa:

> *"dalam penyiapan SDM yang kompoten dalam mengoprasikan e-government perlu pelatihan IT kepada pegawai yang ada, dalam hal ini agar berkembang pengetahuannya mengenai IT oleh pegawai yang ditugaskan, jika perlu samua pegawai paham, karna yang ditakutkan kalau yang paham IT hanya satu orang dan dia tidak hadir dalam sosialisasi atam implementasi maka bisa menjadi hambatan"*

Dari hasil diatas didapatkan perlu adanya pelatihan khusus IT dan ini harus diikuti oleh ASN kecamatan Tibawa demi menghindari masalah yang akan datang kedepannya serta demi melancarkan pengelolaan atau pengaplikasian *e-government* di kecamatan tibawa agar

berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Pelayanan *e-government* di Kecamatan Tibawa

1. Bagaimana peran pemerintah/aparatur dalam menyiapkan sarana/akses yang memudahkan penanganan *e-government.*

   Dalam menunjang penerapan *E-government*hal lain yang harus diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai faktor penting dalam penerapan *E-government*karena merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun infrastruktur teknologi tersebut meliputi jumlah komputer dan jaringan komputer yang memadai sehingga memberikan kemudahan bagi publik dalam mengaksesnya.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Drs. Idrus .H. Palalu selaku sekcam tibawa:

"pemerintah selalu melakukan terobosan/menyiapkan fasilitas elelktronik tertentu untuk pelayanan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah selalu menganggarkan dana untuk fasilitas terkait dengan elektronik yang menunjang semua pelayanan yang ada di kantor kecamatan"

Dari hasil diatas didapatkan bahwa usaha pemerinta selalu dilakukan dalam menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat. Namun anggaran untuk memenuhi ketersediaan sarana masih kurang.

2. Bagaimana peran aparatur dalam mensosialisasikan *e-government* pada masyatakat.

Dari hasil wawancara dengan ibu Ellysta Amu selaku Kasie Trantib mengatakan bahwa:

"peran aparatur sangat mengapresiasi, namun masih harus di tingkatkan dan disosialisasikan lagi agar semua masyarakat bisa paham dan tau mengenai e-government"

Dari hasil diatas didatapkan bahwa peran aparatur sudah baik, namu masih harus lebih ditingkatkan terutama dalam mensosialisasikan aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam hal menerima pelayanan pemerintah, ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang belum paham dengan tata cara serta penggunaan aplikasi.

3. Bagaimana peran aparatur mengelola informasi internal dari publik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitit terhadap ibu Warda Napu, menyatakan bahwa:

"dalam pengelola informasi dari masyarakat, tentunya tidak serta merta kita menerima begitu saja inforasi, perlu kita konfirmasi kembali informasi yang ada, agar mendapatkan satu solusi untuk pemecahan masalah tersebut"

Dalam pengelolaan data internal dari publik aparatur masih melakukan penyelidikan, mengkonfirmasi apa benar data yang dimasukan sudah benar adanya

atau tidak sesuai. Hal ini menunjukan bahwa aparat berperan dengan baik dalam mengelola informasi yang ada.

Penyelenggara Tugas

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi aparat pelaksana tugas *e-government.*

E-government merupakan sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan melalui berbagai media yang mudah diakses dan terpadu. Kehadiran *e-government* akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk melakukan control utamanya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan unit kerja pemrintah Kecamatan Tibawa. Maka pemerintah harus selalu mengawasi perkembangan serta mengawasi pelaksana dalam hal ini aparat yang ditugaskan.selain itu pemerintah harus bisa membimbing dan membina aparat agar tercapainya harapan pemerintah dalam hal ini memudahkan masyarakat.

Dari jawaban bapak Abdurahman Abdul, S.AP selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian, menyatakan bahwa:

"peran kecamatan melakukan pembimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan secara kotinue agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, disamping itu pelaksanaan perlu diikutkan diklat peningkatan kompotensi agar perubahan sistem akan bisa terus bisa diikuti"

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan pemerintah kecamatan selalu melakukan kontrol terhadap aparat yang bertugas di bidang *e-Geovernment* demi mengikuti perkembangan yang terjadi dilapangan.

2. Bagaimana Peran Kecamatan dalam Mengawasi Penanganan *e-government*

Dari hasil wawancra dengan bapak Drs. Latif Supatman, M.Pd selaku camat di kecawatan tibawa, menyatakan bahwa:

"di era digital saat ini, bahwa peran ASN dalam penerapan e-government tentu sangat dibutuhkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat"

Dari hasil diatas menunjukan bahwa pemerintah sangat koperatif dan aktif dalam pengawasan penerapan *e-government*, hal ini dilakukan agar menjadikan kecamatan lebih maju dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

Peran aparatur sebagai penyelenggara tugas pelayanan publik yang bebas KKN.

Salah satu peran yang harus dilakukan oleh aparatur sipil Negara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimasudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi didalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar

pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari pancasila itu sendiri.

Himbauan kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh aparatur sipil Negara, dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh aparatur sipil negara melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh (ASN) kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elite pemerintahan.

1. Bagaimana pemberian layanan di kecanamatan, apakah sudah berbasis *e-government.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat yaitu ibu Sella Jehan Yusuf, manyatakan bahwa:

> *"pelayanannya sudah seperti yang diharapkan, karena sudah tidak ada lagi yang ngantri seperti mengurus surat dan dokumen, selain itu sudah tidak ada pemungutan biaya"*

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pemberian pelayanan di kecamatan sudah berbasis *e-government* , hal ini dibuktikan segala pengurusan dilakukan dengan online dan datanya diperiksa oleh aparat jika sesuai data yang diisi secara online dengan keadaan masnyarakat.

2. Menurut bapak/ibu apa saja hambatan dalam penerapan *e-government* di kecamatan.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan Indrajit (2002) bahwa terdapat beberapa indikator penting dalam penerapan *E-government*, dimana indikator tersebut meliputi:

- InfrastrukturData
- Infrastruktur Legal
- Infrastruktur Institusional
- Infrastruktur Manusia
- Infrastruktur Teknologi
- Strategi Pemikiran Pemimpin

Dari hasil wawancara yang dengan ibu Marlin Ibrahim, SE, manyatakan bahwa:

> *"Hambatan dalam penerapan e-government fasilitasnya udah lumayan, namun jaringan kadang kurang normal, dalam hal ini masih sulit untuk mengelolah data"*

Dari penjelasan kedua responden diatas menyatakan masih adanya hambatan dalam pengembangan atau menjalankan aplikasi *e-government* sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.

Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, disebutkan bahwa berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-government.*

Dalam Bab II Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, disebutkan bahwa berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-government*.. Program *E-government* bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat agar lebih mudah di akses.

Sebagimana yang menjadi fokus penelitian yang telah digambarkan dari hasil penelitian di atas dititikberatkan pada indikator peran aparatur dalam menerapkan *E-government* di kecamatan tibawa, hambatan penerapan *E-government*, jaringan yang kurang stabil, SDM yang belum memadai serta masih ada masyarakat yang belum paham atau tau mengenai *E-government*. Dengan demikian maka Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten merujuk pada hasil penelitian dapat dibahas dibawah ini.

Secara garis besar Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo terpenuhi. Namun demikian, dalam rangka pelayanan publik yang optimal, peneliti menyarankan ada baiknya dari segi komunikasi antara aparat dengan masyarakat lebih ditingkatkan terutapa sosialisasi mengenai *Electronic Government* beserta pemanfaatanya. Hal itu tak lain demi mewujudkan sasaran pemerintah untuk memudahkan masyarakat dari segi pelayanan, sekaligus dalam rangka menjamin terlaksanakan tujuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan di indonesia, selain itu bisa meringankan masyarakat serta terhindar dari KKN.

Dijelaskan sebelumnya bahwa Dalam pengertian umum peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. di Kecamatan ini peneliti berpendapat kiranya aparatur dapat lebih berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat serta lebih aktif dalam mensosialisasikan *E-government* dan melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi *E-government*, seperti memberikan pelatihan kepada pegawai kecamatan mengenai IT serta mengembangkan/menambah fasilitas. Sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo (1984) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti yang direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

Adanya *E-government* ini berpengaruh pada tingkat kemudahan masyarakat, karena bisa mengurangi biaya serta bisa menghemat waktu karena tidak harus datang ke kecamatan dalam hal mengurus seusatu. Dalam rangka penerapan *E-government* yang tepat, pemerintah atau aparat harus menyingkronkan data yang diisi dengan keadaan masyarakat tersebut, ini bertujuan agar masyarakat yang mengisi data online dapat di ketahui datanya sesuai dengan keadaan atau statusnya yang diusulkan ke kecamatan. Seperti hasil penelitian diatas aparat masi memperifikasi data yang di masukan atau di isi online sesui tidak dengan keadaan pemohon. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program ini di Desa Kecamatan Tibawa bisa disimpulkan belum baik, karena masih perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum paham sehingga bisa memberikan kesadaran kepada mereka mengenai manfaat *e-government* yang diterapkan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksaan program *E-government* di Kecamatan Tibawa ialah jaringan yang kurang normal, fasilitas kurang lengkap dan SDM yang masih kurang dalam mengoprasikan komputer.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Peran Aparatur Dalam Penerapan *Electronic Government* Era Digital Di Kantor Camat Tibawa Kabupaten Gorontalo, maka dapat diajukan beberapa saran berikut:

Bagi pemerintahan, di harapkan dalam mekanisme Penerapan *E-government* seharusnya selalu ada sosialisasi yang jelas agar masyarakat bisa memahami dan melaksanakan dengan baik. Bagi Kecamatan dalam pelaksanaan Penerapan *E-government* ini harus adanya komunikasi antara pihak pemerintah dan masyarakat agar dalam menjalankan program ini bisa berjalan dengan baik, Diharapkan pihak Kecamatan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Penerapan *E-government* dan pemanfaatan aplikasi ini. Meningkatkan pemahaman aparat dalam bidang IT agar bisa mengoprasikan Penerapan *E-government*.

DAFTAR PUSTAKA

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1984

Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan

Menengah, Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP). 2015. Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja GrafmdoPersada.2002

.